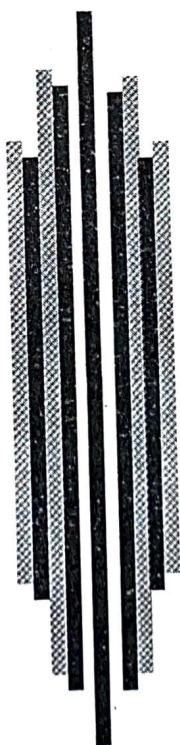




**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 19 September 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2025 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
Dan  
WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp949.161.570.453,- berkurang sebesar Rp76.954.735.605,- sehingga menjadi Rp872.206.834.848,- dengan rincian sebagai berikut:

|    |                           |                            |
|----|---------------------------|----------------------------|
| 1. | Pendapatan Daerah         |                            |
|    | a. semula                 | Rp922.161.570.453,-        |
|    | b. berkurang              | <u>Rp 55.178.800.598,-</u> |
|    | Jumlah setelah perubahan  | Rp866.982.769.855,-        |
| 2. | Belanja Daerah            |                            |
|    | a. semula                 | Rp947.661.570.453,-        |
|    | b. berkurang              | <u>Rp 76.954.735.605,-</u> |
|    | Jumlah setelah perubahan  | Rp870.706.834.848,-        |
|    | Defisit setelah Perubahan | Rp (3.724.064.993,-)       |
| 3. | Pembiayaan Daerah         |                            |
|    | a. penerimaan Pembiayaan  |                            |
|    | 1) Semula                 | Rp27.000.000.000,-         |
|    | 2) Berkurang              | <u>Rp21.775.935.007,-</u>  |
|    | Jumlah setelah perubahan  | Rp 5.224.064.993,-         |
|    | b. pengeluaran Pembiayaan |                            |
|    | 1) Semula                 | Rp1.500.000.000,-          |
|    | 2) Bertambah              | <u>Rp 0,-</u>              |
|    | Jumlah setelah perubahan  | Rp1.500.000.000,-          |
|    | Jumlah Pembiayaan Netto   | Rp3.724.064.993,-          |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

|    |                                       |                            |
|----|---------------------------------------|----------------------------|
| a. | pendapatan asli;                      |                            |
|    | a. Semula                             | Rp136.821.061.088,-        |
|    | b. Bertambah                          | <u>Rp 0,-</u>              |
|    | Jumlah setelah perubahan              | Rp136.821.061.088,-        |
| b. | pendapatan transfer;                  |                            |
|    | a. semula                             | Rp775.241.009.365,-        |
|    | b. berkurang                          | <u>Rp 56.179.300.598,-</u> |
|    | Jumlah setelah perubahan              | Rp719.061.708.767,-        |
| c. | lain-lain pendapatan daerah yang sah. |                            |
|    | a. semula                             | Rp10.099.500.000,-         |
|    | b. bertambah                          | <u>Rp 1.000.500.000,-</u>  |
|    | Jumlah setelah perubahan              | Rp11.100.000.000,-         |

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

|    |                          |                    |
|----|--------------------------|--------------------|
| a. | pajak daerah;            |                    |
|    | a. semula                | Rp52.142.026.713,- |
|    | b. bertambah             | <u>Rp 0,-</u>      |
|    | Jumlah setelah perubahan | Rp52.142.026.713,- |

- |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| b. retribusi daerah;                                   |                    |
| a. semula                                              | Rp12.472.567.015,- |
| b. bertambah                                           | <u>Rp 0,-</u>      |
| Jumlah setelah perubahan                               | Rp12.472.567.015,- |
| c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; |                    |
| a. semula                                              | Rp17.772.775.693,- |
| b. bertambah                                           | <u>Rp 0,-</u>      |
| Jumlah setelah perubahan                               | Rp17.772.775.693,- |
| d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;          |                    |
| a. semula                                              | Rp54.433.691.667,- |
| b. bertambah                                           | <u>Rp 0,-</u>      |
| Jumlah setelah perubahan                               | Rp54.433.691.667,- |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan bersumber dari:
- |                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| a. pendapatan transfer pemerintah pusat; |                            |
| a. semula                                | Rp719.125.573.000,-        |
| b. berkurang                             | <u>Rp 42.613.067.000,-</u> |
| Jumlah setelah perubahan                 | Rp676.512.506.000,-        |
| b. pendapatan transfer antar daerah.     |                            |
| a. semula                                | Rp56.115.436.365,-         |
| b. berkurang                             | <u>Rp13.566.233.598,-</u>  |
| Jumlah setelah perubahan                 | Rp42.549.202.767,-         |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :
- |                                                                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; |                           |
| a. semula                                                                     | Rp10.099.500.000,-        |
| b. bertambah                                                                  | <u>Rp 1.000.500.000,-</u> |
| Jumlah setelah perubahan                                                      | Rp11.100.000.000,-        |

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| a. belanja operasional;   |                            |
| a. semula                 | Rp801.141.217.303,-        |
| b. berkurang              | <u>Rp 62.067.926.496,-</u> |
| Jumlah setelah perubahan  | Rp739.073.290.807,-        |
| b. belanja modal;         |                            |
| a. semula                 | Rp55.211.467.250,-         |
| b. berkurang              | <u>Rp14.754.222.838,-</u>  |
| Jumlah setelah perubahan  | Rp40.457.244.412,-         |
| c. belanja tidak terduga; |                            |
| a. semula                 | Rp3.650.000.000,-          |
| b. berkurang              | <u>Rp1.635.000.000,-</u>   |
| Jumlah setelah perubahan  | Rp2.015.000.000,-          |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| d. belanja transfer.     |                           |
| a. semula                | Rp87.658.885.900,-        |
| b. bertambah             | <u>Rp 1.502.413.729,-</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp89.161.299.629,-        |

#### Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| a. belanja pegawai;         |                            |
| a. semula                   | Rp420.554.443.207,-        |
| b. berkurang                | <u>Rp 1.664.296.405,-</u>  |
| Jumlah setelah perubahan    | Rp418.890.146.802,-        |
| b. belanja barang dan jasa; |                            |
| a. semula                   | Rp362.497.943.927,-        |
| b. berkurang                | <u>Rp 60.298.911.454,-</u> |
| Jumlah setelah perubahan    | Rp302.199.032.473,-        |
| c. belanja hibah;           |                            |
| a. semula                   | Rp16.414.830.169,-         |
| b. bertambah                | <u>Rp 203.981.363,-</u>    |
| Jumlah setelah perubahan    | Rp16.618.811.532,-         |
| d. belanja bantuan sosial;  |                            |
| a. semula                   | Rp1.674.000.000,-          |
| b. berkurang                | <u>Rp 308.700.000,-</u>    |
| Jumlah setelah perubahan    | Rp1.365.300.000,-          |

(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| a. belanja modal tanah.                        |                           |
| a. semula                                      | Rp900.000.000,-           |
| b. berkurang                                   | <u>Rp900.000.000,-</u>    |
| Jumlah setelah perubahan                       | Rp. 0,-                   |
| b. belanja modal peralatan dan mesin.          |                           |
| a. semula                                      | Rp36.147.618.750,-        |
| b. berkurang                                   | <u>Rp16.944.777.150,-</u> |
| Jumlah setelah perubahan                       | Rp19.202.841.600,-        |
| c. belanja modal bangunan dan gedung.          |                           |
| a. semula                                      | Rp5.684.026.200,-         |
| b. bertambah                                   | <u>Rp7.549.362.112,-</u>  |
| Jumlah setelah perubahan                       | Rp13.233.388.312,-        |
| d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; |                           |
| a. semula                                      | Rp4.820.000.000,-         |
| b. berkurang                                   | <u>Rp4.443.000.000,-</u>  |
| Jumlah setelah perubahan                       | Rp 377.000.000,-          |

- |    |                                   |                         |
|----|-----------------------------------|-------------------------|
| e. | belanja modal aset tetap lainnya; |                         |
| a. | semula                            | Rp7.115.002.300,-       |
| b. | bertambah                         | <u>Rp 475.012.200,-</u> |
|    | Jumlah setelah perubahan          | Rp7.590.014.500,-       |
| f. | belanja modal aset lainnya;       |                         |
| a. | semula                            | Rp544.820.000,-         |
| b. | berkurang                         | <u>Rp490.820.000,-</u>  |
|    | Jumlah setelah perubahan          | Rp 54.000.000,-         |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c:
- |    |                          |                          |
|----|--------------------------|--------------------------|
| a. | semula                   | Rp3.650.000.000,-        |
| b. | berkurang                | <u>Rp1.635.000.000,-</u> |
|    | Jumlah setelah perubahan | Rp2.015.000.000,-        |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu belanja bantuan keuangan :
- |    |                          |                           |
|----|--------------------------|---------------------------|
| a. | semula                   | Rp87.658.885.900,-        |
| b. | bertambah                | <u>Rp 1.502.413.729,-</u> |
|    | Jumlah setelah perubahan | Rp89.161.299.629,-        |

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas:

- |    |                          |                           |
|----|--------------------------|---------------------------|
| a. | penerimaan pembiayaan;   |                           |
| a. | semula                   | Rp27.000.000.000,-        |
| b. | berkurang                | <u>Rp21.775.935.007,-</u> |
|    | Jumlah setelah perubahan | Rp 5.224.064.993,-        |
| b. | pengeluaran pembiayaan.  |                           |
| a. | semula                   | Rp1.500.000.000,-         |
| b. | bertambah                | <u>Rp 0,-</u>             |
|    | Jumlah setelah perubahan | Rp1.500.000.000,-         |

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- |    |                                                            |                           |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a. | sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; |                           |
| a. | semula                                                     | Rp27.000.000.000,-        |
| b. | berkurang                                                  | <u>Rp21.775.935.007,-</u> |
|    | Jumlah setelah perubahan                                   | Rp 5.224.064.993,-        |

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yaitu penyertaan modal daerah:

- |    |                          |                   |
|----|--------------------------|-------------------|
| a. | semula                   | Rp1.500.000.000,- |
| b. | bertambah                | <u>Rp 0,-</u>     |
|    | Jumlah setelah perubahan | Rp1.500.000.000,- |

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan

daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2025,

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 7 November 2025

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 7 November 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (5-145/2025)





# LAMPIRAN I



**KOTA PADANGSIDEMPUAN**  
**RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

| KODE       | URAIAN                                                                    | JUMLAH (Rp)               |                           | BERKURANG/BERTAMBAH       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|            |                                                                           | SEBELUM (Rp)              | SESUDAH (Rp)              |                           |
| 1          | 2                                                                         | 3                         | 4                         | 5                         |
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                  |                           |                           |                           |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       | <b>136.821.061.088,00</b> | <b>136.821.061.088,00</b> | <b>0,00</b>               |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                                              | 52.142.026.713,00         | 52.142.026.713,00         | 0,00                      |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                                          | 12.472.567.015,00         | 12.472.567.015,00         | 0,00                      |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 17.772.775.693,00         | 17.772.775.693,00         | 0,00                      |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 54.433.691.667,00         | 54.433.691.667,00         | 0,00                      |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                | <b>775.241.009.365,00</b> | <b>719.061.708.767,00</b> | <b>-56.179.300.598,00</b> |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 719.125.573.000,00        | 676.512.506.000,00        | -42.613.067.000,00        |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 56.115.436.365,00         | 42.549.202.767,00         | -13.566.233.598,00        |
| <b>4.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>10.099.500.000,00</b>  | <b>11.100.000.000,00</b>  | <b>1.000.500.000,00</b>   |
| 4.3.03     | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 10.099.500.000,00         | 11.100.000.000,00         | 1.000.500.000,00          |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                                  | <b>922.161.570.453,00</b> | <b>866.982.769.855,00</b> | <b>-55.178.800.598,00</b> |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                     |                           |                           |                           |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                    | <b>801.141.217.303,00</b> | <b>739.073.290.807,00</b> | <b>-62.067.926.496,00</b> |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                                                           | 420.554.443.207,00        | 418.890.146.802,00        | -1.664.296.405,00         |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 362.497.943.927,00        | 302.199.032.473,00        | -60.298.911.454,00        |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                                                             | 16.414.830.169,00         | 16.618.811.532,00         | 203.981.363,00            |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                                                    | 1.674.000.000,00          | 1.365.300.000,00          | -308.700.000,00           |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                                                      | <b>55.211.467.250,00</b>  | <b>40.457.244.412,00</b>  | <b>-14.754.222.838,00</b> |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah                                                       | 900.000.000,00            | 0,00                      | -900.000.000,00           |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                         | 36.147.618.750,00         | 19.202.841.600,00         | -16.944.777.150,00        |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                         | 5.684.026.200,00          | 13.233.388.312,00         | 7.549.362.112,00          |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                | 4.820.000.000,00          | 377.000.000,00            | -4.443.000.000,00         |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                          | 7.115.002.300,00          | 7.590.014.500,00          | 475.012.200,00            |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                                                | 544.820.000,00            | 54.000.000,00             | -490.820.000,00           |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                              | <b>3.650.000.000,00</b>   | <b>2.015.000.000,00</b>   | <b>-1.635.000.000,00</b>  |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                                                     | 3.650.000.000,00          | 2.015.000.000,00          | -1.635.000.000,00         |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                                   | <b>87.658.885.900,00</b>  | <b>89.161.299.629,00</b>  | <b>1.502.413.729,00</b>   |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan                                                  | 87.658.885.900,00         | 89.161.299.629,00         | 1.502.413.729,00          |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>                                                     | <b>947.661.570.453,00</b> | <b>870.706.834.848,00</b> | <b>-76.954.735.605,00</b> |
|            | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>                                            | <b>-25.500.000.000,00</b> | <b>-3.724.064.993,00</b>  | <b>21.775.935.007,00</b>  |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                  |                           |                           |                           |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                              | <b>27.000.000.000,00</b>  | <b>5.224.064.993,00</b>   | <b>-21.775.935.007,00</b> |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                          | 27.000.000.000,00         | 5.224.064.993,00          | -21.775.935.007,00        |

| KODE   | URAIAN                                                                              | JUMLAH (Rp)       |                  | BERKURANG/BERTAMBAH |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|        |                                                                                     | SEBELUM (Rp)      | SESUDAH (Rp)     |                     |
| 1      | 2                                                                                   | 3                 | 4                | 5                   |
| 6.2    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                                              | 1.500.000.000,00  | 1.500.000.000,00 | 0,00                |
| 6.2.05 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 1.500.000.000,00  | 1.500.000.000,00 | 0,00                |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                                       | 1.500.000.000,00  | 1.500.000.000,00 | 0,00                |
|        | Pembiayaan Netto                                                                    | 25.500.000.000,00 | 3.724.064.993,00 | -21.775.935.007,00  |
| 6.3    | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)                       | 0,00              | 0,00             | 0,00                |

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 7 November 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RAHMAT MARZUKI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (5-145/2025)

